



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas,
Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan



NOMOR : OT.04/LKIN-5/D402/2023
TANGGAL : 6 JANUARI 2023

A. Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang akuntan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara.

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan mempunyai tugas mengelola dan membina kegiatan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya di bidang konektivitas, pariwisata, kawasan industri, dan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2021 menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang konektivitas, pariwisata, kawasan industri, dan perumahan;
- b. Perencanaan pengawasan intern, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan akuntabilitas pada badan usaha dan badan lainnya di bidang konektivitas, pariwisata, kawasan industri, dan perumahan;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang konektivitas, pariwisata, kawasan industri, dan perumahan;
- d. Pelaksanaan pengawasan intern atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan penilaian kapabilitas satuan pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang konektivitas, pariwisata, kawasan industri, dan perumahan;
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara bukan pajak pada badan usaha dan badan lainnya di bidang konektivitas, pariwisata, kawasan industri, dan perumahan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan badan usaha dan badan lainnya di bidang konektivitas, pariwisata, kawasan industri, dan perumahan;

- g. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada badan usaha dan badan lainnya di bidang konektivitas, pariwisata, kawasan industri, dan perumahan;
- h. Pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral pembangunan nasional pada badan usaha dan badan lainnya di bidang konektivitas, pariwisata, kawasan industri, dan perumahan; dan
- i. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada badan usaha dan badan lainnya di bidang konektivitas, pariwisata, kawasan industri, dan perumahan.

B. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan



C. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia (SDM) atau pegawai pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan per 22 Desember 2022 berdasarkan jabatan disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
SDM Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas,
Pariwisata, Kawasan Industri berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	
1	Struktural		1
2	Auditor Madya Selaku Korwas		3
3	Auditor		24
	Auditor Madya	5	
	Auditor Muda	6	
	Auditor Pertama	6	
	Auditor Penyelia	3	
	Auditor Pelaksana	2	
	Calon Auditor Pelaksana	2	
4	Keuangan, Pengadministrasian Umum, Sekretaris		4
	Jumlah		32

D. Kegiatan dan Layanan Produk

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk mencapai sasaran kinerja sebagai berikut:

- Mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas badan usaha dalam pencapaian program prioritas nasional seperti proyek strategis nasional pembangunan bandar udara, pelabuhan dan kereta api;
- Mendukung peningkatan kinerja korporasi dalam mencapai target yang ditetapkan;
- Membantu peningkatan efektivitas *governance*, yaitu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen risiko dan kapabilitas SPI BUMN.

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan memberikan layanan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan kegiatan konsultasi (*consulting*).

1. Pemberian keyakinan (*assurance*)

Kegiatan *assurance* bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan *assurance* meliputi:

- a. **Audit**, yaitu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi korporasi.
- b. **Reviu**, penalaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- c. **Evaluasi**, serangkaian kegiatan membandingkan hasil/capaian suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- d. **Pemantauan**, penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Konsultasi (*consulting*)

Kegiatan konsultasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan konsultasi meliputi:

- a. **Bimbingan Teknis**, kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa tuntunan dan masukan untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat teknis.
- b. **Asistensi**, kegiatan membantu korporasi dalam rangka memperlancar tugas dan memberikan nilai tambah bagi korporasi.
- c. **Sosialisasi**, pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan dan penjabaran suatu informasi.

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan memiliki produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen BUMN khususnya pada SPI BUMN, yaitu Program Peningkatan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern Korporasi.

E. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini disusun untuk tujuan mengomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan dalam tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, sistematika penyajian adalah sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan yang memuat tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan, kegiatan dan layanan produk, struktur organisasi, dukungan sumber daya serta sistematika laporan.

- Bab II** Perencanaan Kinerja, menguraikan Rencana Kegiatan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 2022. Rencana strategis memuat penjelasan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan, sasaran program dan indikator kinerja program, serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.
- Bab III** Akuntabilitas Kinerja, menguraikan capaian dan analisis kinerja setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan, realisasi anggaran yang digunakan mendukung kegiatan, dan hasil survei kepuasan mitra.
- Bab IV** Penutup, menguraikan ringkasan capaian tujuan, sasaran kegiatan, hambatan pencapaian sasaran dan upaya perbaikan kinerja, serta pencapaian dan peningkatan kinerja periode mendatang.

A. Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2020 - 2024 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BPKP. BPKP memiliki dua tujuan yang akan diwujudkan dalam periode Renstra 2020 - 2024, yaitu:

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional.
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Tujuan 1

Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional

Tujuan pertama adalah “Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Tujuan ini dijabarkan dalam lima sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau pencapaian *outcome* program yang diselenggarakan. Kelima sasaran strategis tersebut adalah:

- a. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah
- b. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional
- c. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha
- d. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi
- e. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian K/L/Pemda/BU

Dari kelima sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Akuntan Negara akan berkontribusi pada empat sasaran strategis, yaitu **Sasaran Strategis butir a, b, c, dan e**. Dengan demikian, sasaran kegiatan pada Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan didasarkan pada **Sasaran Strategis butir a, b, c, dan e** sebagaimana tersebut di atas.

Tujuan 2

Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat

Sasaran kinerja yang bersifat “*enablers*” perlu ditetapkan sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi dan mampu mendukung BPKP dalam mencapai kinerja. Sasaran kinerja *enablers* BPKP adalah “Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas”.

Sasaran kinerja ini akan diwujudkan melalui program dukungan manajemen internal.

Tujuan Kedua yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul Akuntabel dan Sehat” ditetapkan sasaran kegiatan, yaitu “Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja” yang merupakan pelaksanaan dukungan pengawasan yang mendukung secara tidak langsung kegiatan teknis pengawasan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan tersebut yaitu Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan

2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Tercapainya tujuan program pada tingkat kedeputian Bidang Akuntan Negara didukung oleh ketercapaian kegiatan yang dilakukan oleh unit eselon II pada Deputi Bidang Akuntan Negara. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan kegiatan pengawasan akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan (IKK).

Program pada Deputi Bidang Akuntan Negara terdiri dari Program 06 (Program Pengawasan Pembangunan) dan Program 01 (Program Dukungan Manajemen Internal). Program 06 (Program Pengawasan Pembangunan) merupakan gabungan dari seluruh sasaran program yang mendukung pencapaian target sasaran strategis pada tujuan pertama Renstra BPKP yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional. Program 01 (Program Dukungan Manajemen Internal) merupakan program yang mendukung pencapaian target sasaran pada tujuan kedua Renstra BPKP, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Seluruh sasaran dan indikator kinerja kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja program. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan

Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kegiatan		
Program 06: Program Pengawasan Pembangunan		
Kegiatan 23: Pengawasan Pembangunan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan		
1	Sasaran kegiatan: Meningkatkan dukungan fiskal BUMN Sektor Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan terhadap keuangan negara	
	IKK 1	Jumlah BUMN Sektor Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik

	IKK 2	Persentase BUMN Sektor Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan dengan Kinerja Sehat
2	Sasaran kegiatan: Meningkatnya dukungan BUMN Sektor Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan terhadap Pembangunan Nasional	
	IKK 1	Jumlah BUMN Sektor Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik
	IKK 2	Jumlah PSN pada BUMN Sektor Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan yang mencapai target
3	Sasaran kegiatan: Meningkatnya Akuntabilitas BUMN Sektor Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan	
	IKK 1	Jumlah BUMN Sektor Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik
4	Sasaran kegiatan: Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional BUMN Sektor Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan	
	IKK 1	Persentase BUMN Sektor Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan dengan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Baik
5	Sasaran kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN Sektor Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan	
	IKK 1	Persentase BUMN Sektor Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan dengan tata kelola korporasi baik
6	Sasaran kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern BUMN Sektor Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan	
	IKK 1	Jumlah K/L dengan MRI \geq Level 3
	IKK 2	Jumlah K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
	IKK 3	Jumlah APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
	IKK 4	Persentase BUMN Sektor Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan dengan MRI \geq Level 3
	IKK 5	Persentase BUMN Sektor Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3
Program 01: Pelaksanaan Dukungan Manajemen Internal		
1	Sasaran kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan	
	IKK 1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara untuk tahun 2020 - 2024 dijabarkan ke dalam target tahunan. Target ini merupakan tahapan pencapaian target secara kumulatif untuk kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Target tahunan diharapkan dapat dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Dengan adanya target kinerja tahunan tersebut, diharapkan upaya pencapaian tujuan jangka menengah dapat lebih terarah. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah	1.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik	Jumlah	5
		1.2	Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	Jumlah	7
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	Jumlah	8
		2.2	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	4
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	9
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha	4.1	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Jumlah	12
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD	5.1	Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	14
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha	6.1	Jumlah K/L dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	2
		6.2	Jumlah K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Jumlah	1

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target
		6.3	Jumlah APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Jumlah	2
		6.4	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	13
		6.5	Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	4
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara	7.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan	Indeks Skala 100	75
		7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1
8	Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputi Akuntan Negara	8.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70
		8.2	Persentase Penyelesaian RTP(MRI Unit Kerja)	Persen	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari komponen perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2022.

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan bertanggung jawab dalam pencapaian target pada sasaran kegiatan dan mendukung pencapaian sasaran program. Capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan merupakan kinerja Subdirektorat Pengawasan di lingkungan Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan.

B. Capaian Kinerja Tahun 2022

Hasil pengukuran kinerja *outcome* Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ringkasan Capaian *Outcome*
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan
Tahun 2022

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah	1.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik	Jumlah	5	7	140%
		1.2	Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	Jumlah	7	11	157,14%
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	Jumlah	8	11	125
		2.2	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	4	8	166,67
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	9	15	150

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha	4.1	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Jumlah	12	17	141,67
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD	5.1	Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	14	17	121,43
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha	6.1	Jumlah K/L dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	2	2	100
		6.2	Jumlah K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Jumlah	1	3	300
		6.3	Jumlah APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Jumlah	2	3	150
		6.4	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	13	23	176,92
		6.5	Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	4	5	125
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara	7.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan	Indeks Skala 100	75	98,35	131
		7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1	2	200
8	Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputi Akuntan Negara	8.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	90	128,57
		8.2	Persentase Penyelesaian RTP(MRI Unit Kerja)	Persen	100	100	100

C. Analisis Capaian Kinerja

Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan Tahun 2022 pada tabel 1 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

Keberhasilan sasaran strategis 1 diukur melalui dua indikator yaitu:

1. Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor dimensi 2 Indeks Akuntabilitas BUMN (*Indonesian Corporate Accountability Index/ICORPAX*), yaitu Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara. Badan Usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara/daerah kategori Baik diukur dengan menggunakan empat parameter yaitu:

- a. Capaian Target *Dividend Payout Ratio*
- b. Persentase Realisasi Pembayaran Pajak
- c. Persentase Realisasi Pembayaran Penerimaan Negara Lainnya
- d. Kontribusi Dividen BUMN terhadap Target Dividen Nasional (APBN)

2. Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat

Indikator ini juga dinilai dengan menggunakan hasil skor dimensi 2 ICORPAX, dimana BUMN dengan kinerja "Sehat" diukur berdasarkan dua parameter, yaitu:

- a. Kesehatan Keuangan Korporasi
- b. *Growth* Kinerja Keuangan

Capaian indikator jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik adalah sebanyak 7 BUMN atau 140% dari target sebanyak 5 BUMN. Sementara itu capaian jumlah BUMN dengan kinerja sehat adalah sebesar 11 BUMN atau 157,14% dari target sebanyak 7 BUMN.

Tabel 3.2

7 BUMN dengan Tingkat Dukungan Fiskal terhadap Keuangan Negara dan Daerah Kategori Baik

No	Nama BUMN	Skor	Predikat
1	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	91,14%	Sangat Baik
2	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	67,73%	Baik
3	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	61,25%	Baik
4	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	73,98%	Baik
5	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	66,48%	Baik
6	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	63,18%	Baik
7	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	86,48%	Sangat Baik

Tabel 3.3
11 BUMN dengan Kinerja Sehat

No	Nama BUMN	Skor	Predikat
1	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	61,36%	Baik
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	82,27%	Sangat Baik
3	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	85,45%	Sangat Baik
4	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	80,00%	Sangat Baik
5	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	85,45%	Sangat Baik
6	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	63,18%	Baik
7	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	82,95%	Sangat Baik
8	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	81,36%	Sangat Baik
9	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	82,95%	Sangat Baik
10	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	65,00%	Baik
11	PT Pos Indonesia (Persero)	66,36%	Baik

Capaian indikator jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik adalah sebanyak 7 BUMN atau 140% dari target sebanyak 5 BUMN. Sementara itu capaian persentase BUMN dengan kinerja sehat adalah sebesar 11 BUMN atau 157,14% dari target sebanyak 7 BUMN.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Strategis 2 diukur melalui dua indikator yaitu:

1. Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik

Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik diukur melalui skor dimensi 1 ICORPAX, melalui penilaian terhadap dua parameter, yaitu:

- a. Tingkat Kinerja Korporasi, yaitu capaian KPI yang terkait dengan proses bisnis utama.
- b. Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan. Tingkat dukungan ini dinilai melalui beberapa aspek penilaian yaitu: Kesesuaian produk lini bisnis utama terhadap program prioritas pemerintah, keberhasilan pelaksanaan atas penugasan pemerintah, cakupan penugasan pemerintah, pencapaian target penugasan, serta ada tidaknya penugasan dari pemerintah yang bermasalah.

2. Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

Jumlah PSN yang mencapai target adalah Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh BUMN yang capaian fisik proyek mencapai atau melebihi target fisik pada tahun yang bersangkutan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan proyek Strategis nasional mencapai target yang ditetapkan.

Capaian indikator jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik adalah sebanyak 11 BUMN atau 137,50% dari target sebanyak 8 BUMN. Sementara itu capaian jumlah PSN yang tercapai sesuai target adalah sebesar 8 proyek PSN atau 200% dari target sebanyak 4 proyek PSN.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 yang melebihi target disebabkan banyaknya BUMN yang ternyata dapat melaksanakan penugasan pemerintah dengan baik, dan diantaranya dengan ketepatan waktu progres fisik pelaksanaan PSN.

Tabel 3.4
11 BUMN dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik

No	Nama BUMN	Skor	Predikat
1	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	88,75	Sangat Baik
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	83,13	Sangat Baik
3	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	88,13	Sangat Baik
4	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	100	Sangat Baik
5	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	94,38	Sangat Baik
6	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	88,13	Sangat Baik
7	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	94,38	Sangat Baik
8	PT Pos Indonesia (Persero)	93,75	Sangat Baik
9	PT Angkasa Pura I (Persero)	83,13	Sangat Baik
10	PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	77,5	Baik
11	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	76,88	Baik

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Strategis 3 ditunjukkan dengan jumlah BUMN yang dapat memperoleh nilai baik pada hasil pengukuran akuntabilitas korporasi sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 diukur dengan menggunakan seluruh dimensi dalam ICORPAX, dimana seluruh dimensi ini mewakili akuntabilitas BUMN secara komprehensif, yang terdiri dari:

1. Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan
2. Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara
3. Dimensi Kepatuhan dan Efektivitas Operasional
4. Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi
5. Dimensi Efektivitas Pengendalian Fraud

Pengukuran indeks tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber utama dari data terpublikasi, berupa Laporan Tahunan (Annual Report) BUMN, informasi yang berasal dari website resmi BUMN, dan laporan-laporan dari Institusi/Lembaga yang validitasnya terjamin. Pelaksanaan atas pengukuran ICORPAX juga dapat diperkuat dengan melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada masing-masing BUMN.

Capaian indikator jumlah badan usaha dengan akuntabilitas badan usaha yang baik adalah sebanyak 15 BUMN atau 166,67% dari target sebanyak 9 BUMN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5
Hasil penilaian ICORPAX 15 BUMN dengan predikat Baik

No	Nama BUMN	Skor	Predikat
1	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	83,17	Sangat Baik
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	81,18	Sangat Baik
3	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	72,58	Baik
4	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	65,48	Baik
5	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	77,31	Baik
6	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	79,87	Baik
7	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	83,01	Sangat Baik
8	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	85,64	Sangat Baik
9	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	76,11	Baik
10	PT Pos Indonesia (Persero)	73,42	Baik
11	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	65,28	Baik
12	PT Angkasa Pura I	69,05	Baik
13	PT Angkasa Pura II	65,28	Baik
14	PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	71,14	Baik
15	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	74,56	Baik

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Strategis 4 ditunjukkan dengan pencapaian satu indikator kinerja yaitu Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik, dengan kriteria BUMN yang mampu mengelola proses bisnisnya dengan baik, memiliki skor kepuasan pelanggan yang baik, mampu mengelola aset dengan efektif, serta melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR dan PKBL) secara efektif.

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 3 ICORPAX, yaitu Kepatuhan dan Efektivitas Operasional, dengan parameter penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan, yang dinilai melalui ada atau tidaknya permasalahan hukum yang dihadapi serta kepatuhan terhadap regulasi industri dimana BUMN tersebut melakukan bisnisnya.
2. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), yang dinilai melalui keselarasan program TJSL dengan program prioritas pencapaian SDGs, keberadaan program TJSL yang mendukung bisnis inti dan menciptakan *shareholder value*, serta jumlah mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha.
3. Tingkat Kepuasan, baik pelanggan, vendor maupun pegawai.
4. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis, yang dinilai melalui pemenuhan *Service Level Agreement*, penerapan *E-Procurement*, keberadaan inovasi, penerapan teknologi informasi, serta pengelolaan SDM.
5. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset, yang dinilai melalui penerapan *Asset Management Policy*, *Asset Management Plans*, *Asset Portfolio*, Rasio *Return on Asset*, serta Rasio *Fixed Asset Turnover*.

Capaian indikator jumlah badan usaha dengan efektivitas operasional baik adalah sebesar 17 BUMN atau 141.67% dari target sebesar 12 BUMN. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 ini diperoleh dari hasil pengukuran dimensi 3 ICORPAX, yang menunjukkan bahwa jumlah BUMN yang memiliki hasil pengukuran dimensi 3 kategori baik melebihi jumlah BUMN yang ditargetkan memiliki nilai kategori baik untuk dimensi 3. Hal ini menunjukkan bahwa BUMN cukup mampu melakukan operasinya dalam koridor peraturan perundang-undangan, serta mampu melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik.

Tabel 3.6
Hasil penilaian 17 BUMN dengan efektivitas operasional predikat Baik

No	Nama BUMN	Skor	Predikat
1	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	87,75%	Sangat Baik
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	97,08%	Sangat Baik
3	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	89,17%	Sangat Baik
4	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	79,50%	Baik
5	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	66,42%	Baik
6	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	72,67%	Baik
7	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	64,50%	Baik
8	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	66,33%	Baik
9	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	72,67%	Baik
10	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	89,33%	Sangat Baik
11	PT Pos Indonesia (Persero)	73,25%	Baik

No	Nama BUMN	Skor	Predikat
12	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	76,33%	Baik
13	PT Angkasa Pura I (Persero)	64,42%	Baik
14	PT Angkasa Pura II (Persero)	65,58%	Baik
15	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	61,50%	Baik
16	PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	76,92%	Baik
17	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	65,58%	Baik

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kualitas Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD

Pencapaian Sasaran Strategis 5 ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik.

Keberhasilan sasaran ini diukur dengan menggunakan hasil skor dimensi 5 ICORPAX yaitu Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi, yang dinilai melalui empat parameter, yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Tata Kelola (GCG), yang akan dinilai melalui pelaksanaan hak-hak *stakeholder*, transparansi, tanggung jawab direksi, serta skor asesmen GCG.
2. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko, yang akan dinilai melalui keberadaan *framework*, pelaksanaan proses manajemen risiko, serta hasil pengukuran *risk maturity level*.
3. Tingkat Kapabilitas Satuan Pengawas Internal, yang akan diukur melalui hasil pengukuran kapabilitas SPI dan persentase tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan SPI.
4. Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, yang diukur melalui keberadaan *framework internal control*, pelaksanaan proses pengendalian, ada tidaknya asersi internal control, ada tidaknya laporan keuangan *audited*, ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan, serta skor efektivitas sistem pengendalian intern.

Capaian indikator persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik adalah sebanyak 17 atau 121,43% dari target sebanyak 14.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 dapat dicapai karena pada tahun 2022 banyak BUMN yang dilakukan asesmen GCG oleh BPKP, dan beberapa di antaranya mengalami peningkatan skor GCG, yang berkontribusi pada hasil pengukuran pada dimensi 4 ICORPAX.

Tabel 3.7
Hasil Penilaian 17 BUMN dengan Tata Kelola Korporasi Baik

No	Nama BUMN	Skor	Predikat
1	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	93,23	Sangat Baik
2	PT PP Properti Tbk.	93,206	Sangat Baik
3	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	92,82	Sangat Baik
4	Perum Produksi Film Negara	79	Baik
5	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	83,734	Baik
6	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	88,18	Baik
7	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	83,6	Baik
8	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	81,02	Baik
9	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	75,772	Baik
10	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	85,22	Sangat Baik
11	PT Pos Indonesia (Persero)	85,46	Sangat Baik
12	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	81,94	Baik
13	PT Angkasa Pura I (Persero)	95,23	Sangat Baik
14	PT Angkasa Pura II (Persero)	89,97	Sangat Baik
15	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	83,81	Baik
16	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	86,934	Sangat Baik
17	PT Garuda Indonesia	75,018	Baik

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya kualitas Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan melalui pendampingan dan pengawasan BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan tingkat kematangan pelaksanaan pengendalian internal pemerintah dan tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta serta Satuan Pengawas Intern (SPI) pada korporasi.

Keberhasilan sasaran strategis ini akan diukur melalui 5 indikator yaitu:

1. Persentase K/L dengan Indeks Manajemen Risiko \geq Level 3

Indeks Manajemen Risiko merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur kondisi karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/P. Model tersebut memadukan budaya (*culture*), tata kelola (*governance*), dan proses terkait manajemen risiko. Semakin tinggi Indeks Manajemen Risiko, diharapkan akan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen risiko dan pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Pengukuran kualitas implementasi MR dilaksanakan dengan pendekatan *maturity level*, *capability level* maupun *maturity objectives*. Ketiga pendekatan tersebut memberikan gambaran kualitas implementasi MR yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, dengan melihat lima dimensi: struktur, budaya, proses, penggunaan aplikasi (teknologi informasi), dan hasil.

Capaian pada indikator ini adalah sebanyak 2 K/L dari populasi K/L yang diampu atau 100% dari target sebanyak 2 K/L, yaitu Kementerian BUMN dan LPP TVRI dengan Level MR 3.

Capaian tersebut didapatkan melalui metode penilaian SPIP Terintegrasi sampai dengan proses Penjaminan Kualitas yaitu pada LPP TVRI dan metode penilaian SPIP Baseline pada Kementerian BUMN dan LPP RRI.

2. Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Setiap tingkat maturitas memiliki karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan birokrasi yang semakin berkualitas. Indikator maturitas penyelenggaraan SPIP mengindikasikan kinerja BPKP dari hasil pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Indikator ini mengukur penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi area-area penyelenggaraan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan peningkatan penyelenggaraan SPIP. Maturitas SPIP diukur berdasarkan tingkat kematangan pada 5 unsur pengendalian yaitu: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) pemantauan pengendalian intern.

Capaian pada indikator ini adalah seluruh K/L yang diampu telah mencapai maturitas SPIP level 3 (3 K/L) atau 300% dari target sebanyak 1 K/L.

Capaian tersebut didapatkan melalui metode penilaian SPIP Terintegrasi sampai dengan proses Penjaminan Kualitas yaitu pada LPP TVRI dan metode penilaian SPIP Baseline pada Kementerian BUMN dan LPP RRI.

3. Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan yang dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Indikator ini diukur dengan model yang mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)*. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk naik dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif terkait dengan organisasi yang lebih matang. Di dalam model IACM, APIP dibagi menjadi lima level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimized*).

Indikator Kapabilitas APIP pada kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mencerminkan tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif. Dari indikator ini dapat diketahui kapabilitas APIP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta teridentifikasi area-area kapabilitas APIP yang memerlukan perbaikan untuk peningkatan kapabilitas APIP.

Capaian pada indikator ini adalah seluruh K/L yang diampu telah mencapai kapabilitas APIP Level 3 (3 K/L) atau 150% dari target 2 K/L.

4. Persentase Badan Usaha dengan Indeks Manajemen Risiko \geq Level 3

Pada sektor Korporasi/Badan Usaha, manajemen risiko pada umumnya telah terintegrasi dalam proses bisnis sehari-hari. Badan Usaha dengan MRI Baik tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis; menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan. Indikator ini diukur dengan menggunakan Jumlah BUMN yang berada pada maturitas MR Level 3 dibagi dengan jumlah total BUMN, yang diampu oleh Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan

Pada tahun 2022, jumlah BUMN yang telah mencapai maturitas manajemen risiko Level 3 adalah sebanyak 23 BUMN/Anak Perusahaan dari populasi sebanyak 60 BUMN/Anak Perusahaan. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 13 BUMN/Anak Perusahaan.

Tabel 3.8
BUMN dengan Maturitas Manajemen Risiko Level 3

No	Nama BUMN	Level MR
1	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	5
2	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	4
3	PT Cipta Integration Logistics Solutions (PT ILCS)	4
4	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	4
5	PT Terminal Teluk Lamong	4

No	Nama BUMN	Level MR
6	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	3
7	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	3
8	PT PDI Pulau Batam (Persero)	3
9	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	3
10	PT Energy Pelabuhan Indonesia (PT EPI)	3
11	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI)	3
12	PT Jasa Armada Indonesia (PT JAI)	3
13	PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)	3
14	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	3
15	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	3
16	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	3
17	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	3
18	PT Pos Indonesia (Persero)	3
19	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	3
20	PT Angkasa Pura I (Persero)	3
21	PT Angkasa Pura II (Persero)	3
22	PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	3
23	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	3

5. Persentase BUMN dengan Kapabilitas Satuan Pengawas Intern \geq Level 3

Dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Korporasi perlu mengevaluasi kualitas fungsi audit internal (Satuan Pengawasan Intern) untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders*-nya. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi audit internal, SPI harus menilai kapabilitasnya dan melaksanakan rekomendasi perbaikan.

Penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN dilakukan dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5) dibagi jumlah total BUMN.

Pada tahun 2022, jumlah BUMN yang telah memiliki SPI dengan kapabilitas Level 3 adalah sebanyak 5 BUMN/Anak Perusahaan, dari populasi sebanyak 60 BUMN/Anak Perusahaan. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 4 BUMN/Anak Perusahaan.

Tabel 3.9
BUMN dengan Kapabilitas SPI Level 3

No	Nama BUMN	Level Kapabilitas SPI
1	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3
2	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	3
3	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	3
4	PT Pos Indonesia (Persero)	3
5	PT Terminal Teluk Lamong	3

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara

Pencapaian Sasaran Strategis 7 ini akan diukur melalui 2 indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan.

Target indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan pada tahun 2022 adalah sebesar 75 (skala 1 s.d 100). Realisasi indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan sesuai hasil survei kepuasan *stakeholders* adalah 98,35. Capaian indikator ini adalah 131,13%. Skor hasil survei kualitas layanan eksternal atau survei kepuasan *stakeholders* disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.10
Skor Hasil Survei Kualitas Layanan Eksternal/Stakeholders

No	Unsur Pelayanan	Skor Kepuasan
1	Persyaratan	97,66
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	98,44
3	Waktu Penyelesaian	96,09
4	Biaya/Tarif	100,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	99,22
6	Kompetensi Pelaksana	98,44
7	Perilaku Pelaksana	98,44
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	100,00
9	Sarana dan Prasarana	99,00
10	Skor Indeks Kepuasan	98,35

2. Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi
Target jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan pada tahun 2022 adalah sebesar 1. Realisasi jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan adalah 2 yaitu melalui teknologi informasi IACM atau SPIP Korporasi dan GCG. Capaian indikator ini adalah 200%.

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputi Akuntan Negara

Pencapaian Sasaran Strategis 8 ini akan diukur melalui 2 indikator yaitu:

1. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)

Target persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja) Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan pada tahun 2022 adalah sebesar 70 (skala 1 s.d 100). Realisasi persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja) Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan adalah 90. Capaian indikator ini adalah 128,57%.

2. Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

Target persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan pada tahun 2022 adalah sebesar 100 (skala 1 s.d 100). Realisasi persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan adalah 100. Capaian indikator ini adalah 100%.

D. Capaian Output Pengawasan Tahun 2022

Realisasi capaian output pengawasan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan pada Tahun 2022 adalah sebanyak 21 LHP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Ringkasan Capaian Output Pengawasan
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan
Tahun 2022

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target LHP	Realisasi LHP	Capaian (%)
4222.UAG.00. U10.052	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha - Pelaksanaan Pengawasan	2	3	150
4222.UAG.00. U03.052	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan - Pelaksanaan Pengawasan	3	3	100
4222.FAG.00. U06.052	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha - Pelaksanaan Pengawasan	2	3	150
4222.FAG.51.0 03.052	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan - Pelaksanaan Pengawasan	5	6	120
4222.UAG.00. U08.051	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L - Perencanaan Pengawasan	6	6	100
4222.UAG.00. U08.052	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L Pelaksanaan Pengawasan	2	3	150
Jumlah		20	24	120

E. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran berdasarkan data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.591.854.311 atau 99,66% dari total anggaran sebesar Rp1.597.222.000, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.12

Anggaran dan Realisasi Keuangan

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan
Tahun 2022

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
4222.UAG.00. U10.052	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha - Pelaksanaan Pengawasan	203.569.000	202.217.669	99,34
4222.UAG.00. U03.052	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan - Pelaksanaan Pengawasan	172.330.000	172.312.341	99,99
4222.FAG.00. U06.052	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha - Pelaksanaan Pengawasan	527.619.000	527.401.701	99,96
4222.FAG.51.0 03.052	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan - Pelaksanaan Pengawasan	625.654.000	621.879.400	99,40
4222.UAG.00. U08.051	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L - Perencanaan Pengawasan	21.745.000	21.738.200	99,99
4222.UAG.00. U08.052	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L Pelaksanaan Pengawasan	46.305.000	46.305.000	99,99
Jumlah		1.597.222.000	1.591.854.311	99,66

Dari realisasi anggaran sebesar 99,66%, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan mampu mendukung capaian output sebesar 105% dengan capaian kinerja sebesar 157,50%, sehingga kegiatan dapat disimpulkan telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran.

04 PENUTUP

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022

Laporan kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan tahun 2022 disusun sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor HK.01/SE-11/SU/01/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan menetapkan tujuh sasaran kegiatan. Ketujuh sasaran kegiatan tersebut mendukung tujuh sasaran program Deputi Bidang Akuntan Negara. Secara keseluruhan, target sasaran kegiatan tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan telah tercapai melebihi target, yaitu rata-rata 157,50%.

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan dapat mencapai target tahun 2022 karena beberapa faktor, yaitu:

1. Sinergi antar unit kerja untuk menyelesaikan target.
2. Penyusunan pedoman pengawasan sebagai panduan kegiatan pengawasan baik di pusat maupun di perwakilan dan untuk menjaga standar mutu pengawasan.
3. Kompetensi sumber daya manusia yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan.
4. Penggunaan aplikasi dalam pengawasan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan, yaitu:

1. Kompetensi SDM yang tidak merata.
Kompetensi SDM terkait pengawasan di Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target tahun 2022, baik kompetensi dalam substansi maupun kompetensi terkait teknologi informasi.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai
Diperlukan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi pendukung pengawasan seperti pada aplikasi PK SPI Korporasi (IACM).

b. Rencana Tindak Tahun 2023

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan menetapkan rencana tindak pada tahun 2023 dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan pengawasan tahun 2023 dengan memperhatikan dan memprioritaskan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2023.
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang terkait dengan kualitas pengendalian intern, antara lain tata kelola (GCG), manajemen risiko dan kapabilitas satuan pengawas intern badan usaha.
3. Melakukan pengawasan terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh BUMN dalam menyelenggarakan operasi perusahaan dan mendukung pembangunan.
4. Mengembangkan metode pengawasan berbasis IT (database dan aplikasi).
5. Melakukan monitoring pengawasan pada periode awal, pertengahan, hingga akhir pengawasan.
6. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan, untuk memperoleh umpan balik bagi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Berdasarkan analisis capaian kinerja, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sehingga dapat diambil strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dan meminimalkan risiko yang ada.

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan. Atas perkenan Ibu Deputi, kami sampaikan terima kasih.

Direktur,

